



RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT TANGGAL 23 AGUSTUS 2024

Komisi V DPR RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 23 Agustus 2024, yang dipimpin oleh **Bapak Sigit Susiantomo** (Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS) dan diikuti oleh 4 orang Anggota Komisi V DPR RI dari berbagai Fraksi. Kunker ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap infrastruktur dan transportasi Jembatan Timbang Tomo kabupaten Sumedang.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Tim kunker Komisi V DPR RI meninjau kegiatan operasional Jembatan timbang atau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang merupakan salah satu alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang ataupun angkutan yang melebihi batas ketentuan dengan memiliki fungsi pencatatan, fungsi pengawasan dan fungsi penindakan. Pada pengawasan tersebut, masi terlihat jenis pelanggaran baik itu over loading, administrasi dokumen kendaraan, over dimensi dan tata cara pemuatan barang serta terdapat antrian panjang Truk pada sisi jalan dan area jembatan timbang dikarenakan luas area jembatan timbang yang terbatas/kecil serta tidak memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan barang.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Tim Kunker Komisi V DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi V DPR R yaitu Ditjen Darat Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Sumedang serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada pertemuan tersebut, dibahas progress kegiatan operasional jembatan timbang tomo yang semakin baik proses pelayanannya. Dimana terlihat dari jenis pelanggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan bila di bandingkan dengan tahun 2023. Hal ini bersamaan dilakukannya Operasi Simpatik Sadar Keselamatan tanpa *Over Dimension Over Load* (ODOL) serentak diselenggarakan UPPKB di seluruh Indonesia "Sebagai Upaya Bahwa Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Bersama".

Sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 169 menyebutkan bahwa "*pengaturan pengawasan angkutan barang, diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang yang sesuai berat barang telah diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang sesuai berat muatan yang diizinkan dan dikenakan tindak pelanggaran (tilang) bagi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan (tonase)*" hal di tegaskan **oleh Ketua Tim Rombongan** kepada Ditjen Darat Kementerian Perhubungan agar terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan pelayanan di jembatan timbang Tomo berjalan dengan baik dan lancar.

Mengingat posisi jembatan timbang Tomo ini terlihat sederhana namun berdampak sangat besar bagi kondisi jalan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Darat Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan perluasan area parkir dan pembangunan gudang penyimpanan barang serta memastikan teknologi yang digunakan terupdate dan SDMnya memiliki kompetensi di bidangnya terutama SDM Penguji dan SDM Penimbang, tidak gagap terhadap perkembangan teknologi komputerisasi dan informasi.

Terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh UPPKB Tomo selama kegiatan operasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memastikan sudah berjalan sangat baik dan akan selalu terbuka dan mendukung. Sementara koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu memastikan regulasi di tegakan dan pengadaan data manifest barang untuk mengetahui pergerakan barang pada angkutan barang.

Sumedang, 23 Agustus 2024

Tim Kunker Komisi V DPR RI ke Kabupaten Sumedang Prov Jawa Barat